

BAB V KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Pendekatan yang dipakai dalam studi ini adalah metode kuantitatif. Objek penelitian mencakup perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022 hingga 2024. Dari hasil penyaringan yang mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan, sebanyak 68 perusahaan dijadikan sampel, menghasilkan total 215 data observasi. Hasil analisis dari penelitian ini disajikan pada bagian berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan regulasi perpajakan yang membatasi jumlah maksimal pengeluaran CSR yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pembatasan ini membuat perusahaan tidak memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan aktivitas CSR sebagai strategi penghematan pajak. Dengan demikian, meskipun CSR dijalankan oleh perusahaan, implementasinya lebih diarahkan untuk memenuhi kewajiban sosial atau kepatuhan terhadap regulasi, bukan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak secara signifikan.
2. *Capital intensity* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi itu dapat disebabkan oleh adanya regulasi perpajakan yang membatasi peluang perusahaan dalam memanfaatkan biaya penyusutan aset tetap sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak. Di samping itu, keputusan perusahaan dalam melakukan investasi pada aset tetap umumnya lebih ditujukan untuk mendukung kebutuhan operasional dan efisiensi kegiatan usaha, bukan hanya untuk tujuan penghematan pajak. Dengan demikian, fungsi utama aset tetap sebagai penunjang produktivitas perusahaan cenderung mengurangi relevansinya dalam strategi penghindaran pajak.
3. *Thin capitalization* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi itu disebabkan oleh adanya ketentuan yang membatasi

proporsi penggunaan utang, yaitu maksimal sebesar empat kali dari jumlah modal, yang secara langsung membatasi fleksibilitas perusahaan dalam memanfaatkan hutang sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Selain itu, penggunaan utang juga berkonsekuensi pada meningkatnya risiko keuangan perusahaan. Oleh karena itu, demi menjaga stabilitas dan menghindari risiko tambahan, perusahaan cenderung menjauhi praktik *tax avoidance* yang dapat memperbesar risiko yang ditanggung perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Salah satu keterbatasan penelitian terletak pada jumlah sampel yang terbatas, sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi keseluruhan industri manufaktur secara menyeluruh. Keterbatasan ini timbul karena masih minimnya perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan dengan mengacu pada standar indeks GRI, yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai proksi utama. Selain itu, dalam proses penghitungan BTD, laba fiskal yang digunakan merujuk pada entitas induk. Namun, karena tidak tersedia informasi mengenai total aset tetap milik entitas induk secara spesifik, peneliti menggunakan data aset tetap secara konsolidasian, yang berpotensi memengaruhi tingkat akurasi dalam estimasi BTD.

5.3 Saran

Berikut adalah beberapa saran setelah penelitian ini dilakukan:

1. Bagi pemerintah, disarankan untuk mempertahankan serta terus mengembangkan kebijakan dan regulasi perpajakan yang telah diterapkan, mengingat efektivitasnya dalam menekan *tax avoidance*. Kondisi itu didukung oleh temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel CSR, *capital intensity*, dan *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini telah mampu membatasi pemanfaatan strategi-strategi tersebut sebagai sarana penghindaran pajak.
2. Bagi pihak perusahaan, disarankan untuk senantiasa mematuhi ketentuan dan regulasi perpajakan yang berlaku serta menjalankan strategi perpajakan secara legal dan etis. Kepatuhan tersebut penting dilakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan negara, mengingat pajak masih menjadi sumber utama pendapatan nasional.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan proksi alternatif dalam mengukur CSR dan *tax avoidance*, mengingat keterbatasan jumlah perusahaan yang menggunakan indeks standar GRI dalam laporan keberlanjutannya dan proksi BTD yang sudah sering dipakai. Selain itu, disarankan pula untuk mengeksplorasi berbagai variabel lain yang secara teoritis maupun empiris berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance*, serta mempertimbangkan penambahan variabel moderasi dan kontrol